

KAJIAN PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE JAWA TENGAH PERIODE 2008-2012

Arum Akuarista

Alumni Pogram Pasca Sarjana Unversitas Stikubank Semarang
arumakuarista.rbg@gmail.com

Gregorius N. Masdjojo

Pogram Pasca Sarjana Unversitas Stikubank Semarang
gregymasdjojo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2008-2012. Data yang digunakan dalam adalah data sekunder yang meliputi Belanja daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Investasi, dan Pendapatan Asli Daerah dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2008-2012. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi dengan data panel dengan pilihan estimasi *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Hasil uji Haussman menyimpulkan bahwa estimasi menggunakan FEM. Berdasarkan itu hasil penelitian menyimpulkan bahwa Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Produk Regional Bruto dan Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapan Asli Daerah.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, Pendapatan Asli Daerah, *Fixed Effect Model (FEM)*, *Random Effect Model (REM)*.

Abstract

This study aims to analyze the influence of Regional Expenditure, Gross Regional Product, and Investment to the Local Revenue in Central Java Province during the period 2008-2012. The data used in this study is a secondary data including Regional Expenditure, Gross Domestic Product, Investment, and Local Revenue from the 35 District / City in Central Java on the period 2008-2012. Based on Haussman test, then the data was analysed by Fixed Effect Model (FEM) based on panel data multiple regression analysis method. This research found that the Expenditure has no significant effect to the Local Revenue. Gross Regional Product and Investment have significant positive effect on the Local Revenue.

Keywords: *Regional Expenditures, Gross Regional Product, Investment, Local Revenue, Fixed Effect Model (FEM), Random Effect Model (REM)*.

PENDAHULUAN

Dengan berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah yang melimpahkan segala kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka pengelolaan anggaran sektor publik dikelola oleh Pemerintah masing-masing Daerah. Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas perbantuan,

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Created with

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya Pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi.

Perubahan alokasi belanja ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah (Wong, 2004 dalam Adi, 2006).

Lingkup anggaran akan menjadi relevan dan penting dalam lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja Pemerintah, sehubungan dengan fungsi Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran sektor public Pemerintah Daerah merupakan *output* pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key 1940 dalam Fozzard, 2001).

Santosa dan Rahayu (2005) mengatakan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto merupakan hubungan secara fungsional, karena Produk Domestik Regional Bruto merupakan fungsi dari Pendapatan Asli Daerah. Dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto maka akan menambah penerimaan daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah kepada

masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

Pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan akan lebih sulit dilakukan Pemerintah Daerah apabila tanpa adanya dukungan dari pihak swasta. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung penanaman modal yang saling menguntungkan baik bagi Pemerintah Daerah, pihak swasta maupun terhadap masyarakat daerah. Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif, diharapkan akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam pembangunan daerah.

Konsekuensi atas penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah mengakibatkan perlunya pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebabkan terjadinya transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah secara leluasa dapat menggunakan dana tersebut untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang mungkin tidak penting. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah?
2. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah?
3. Menganalisis pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah?

TINJAUAN TEORI

1. Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari kata Yunani *outos* dan *nomos*, *aotos* berarti “sendiri” dan *nomos* berarti “perintah”. Sehingga otonomi bermakna “memerintah sendiri”. Otonomi daerah dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada

meningkatkan kesejahteraan. Menurut Soemitro (1995) otonomi daerah mempunyai empat tujuan, yaitu:

1. Peningkatan ekonomi masyarakat setempat;
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan social budaya masyarakat;
4. Untuk demokratisasi

Otonomi daerah adalah bagian dari demokratisasi, demokrasi ditandai dengan *sharing of power*, secara horizontal dengan memberdayakan parlemen dan memandirikan peradilan dan secara vertikal dengan pelimpahan kewenangan pada lapisan-lapisan pemerintahan di daerah. Dengan itu diharapkan tidak ada lagi cabang kekuasaan, lapisan kekuasaan, sekelompok orang ataupun seseorang yang mengontrol kekuasaan secara monolitik dan hegemonik.

Kewenangan otonomi daerah adalah keseluruhan kewenangan-kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan, seperti perencanaan, perizinan dan pelaksanaan, kecuali kewenangan di bidang pertahanan keamanan, peradilan, politik luar negeri, moneter dan agam serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan otonomi di tingkat Propinsi meliputi kewenangan lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan daerah otonom Kabupaten/Kota serta kewenangan lainnya (Safitri, 2009).

Otonomi haruslah mampu menggali potensi yang ada di daerah guna mencapai tujuan yang positif berupa percepatan pembangunan dan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat serta upaya pemberdayaan masyarakat.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Istilah

Belanja pada umumnya hanya digunakan di sektor publik, tidak di sektor bisnis. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Belanja di sektor publik secara konsep berbeda dengan biaya yang lebih umum di sektor bisnis.

Berdasarkan peraturan yang baru yaitu Permendagri No. 21 Tahun 2011 (Revisi atas Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah), klasifikasi belanja dalam sistem anggaran diperbaiki. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi :

- a. Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan.
- b. Belanja Langsung, adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebelumnya disebut juga dengan istilah belanja pembangunan. Belanja langsung sangat strategis karena merupakan penjabaran pelaksanaan program-program kegiatan pembangunan Pemerintah yang tersebar ke dalam urusan wajib dan pilihan yang secara langsung akan diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, besar kecilnya belanja langsung akan mempengaruhi perekonomian daerah.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi (seluruh unit produksi), di suatu wilayah tertentu (propinsi dan Kabupaten/Kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun kalender), tanpa mempertimbangkan kepemilikan.

Pendekatan penyusunan PDRB dengan menggunakan data dasar secara langsung dapat dilakukan dengan menggunakan 3 macam pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan produ

Pendekatan produksi adalah menghitung nilai tambah dengan cara mengurangi biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap-tiap sektor atau subsektor.

b. Pendekatan pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB dikatakan sebagai jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta di dalam proses produksi di suatu wilayah pada periode tertentu, biasanya selama satu tahun.

c. Pendekatan pengeluaran

Pendekatan ini dari segi pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa di dalam wilayah. Jadi diperoleh dengan cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir yang membentuk produk domestik regional tersebut.

4. Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 1994:107).

Investasi atau pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dibedakan menjadi investasi perusahaan swasta, perubahan inventaris perusahaan dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Investasi perusahaan merupakan komponen yang terbesar dari investasi dalam suatu Negara. Pengeluaran investasi tersebut meliputi mendirikan bangunan industri, membeli mesin-mesin dan peralatan produksi lain dan pengeluaran untuk menyediakan bahan mentah. Investasi yang dilakukan di

masa kini sangat erat hubungannya dengan prospek memperoleh keuntungan di masa depan.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Sutrisno (1984:200) pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah.

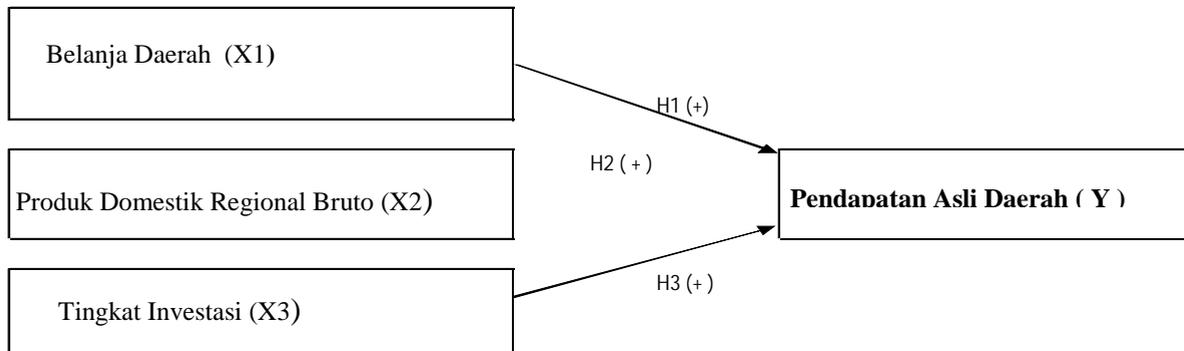
Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya.

Menurut pasal 6 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah berasal dari :

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Penerimaan dari dinas dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Jadi di satu pihak menghimpun dana sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di lain pihak lebih mengarah kepada publik service dan bersifat penyuluhan yaitu tidak mengambil keuntungan, melainkan hanya sekedar untuk menutup resiko biaya administrasi yang dikeluarkan.

PERUMUSAN HIPOTESIS



1. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Propinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Aziz et.al (2000), Doi (1998), Von Furtenberg (1998) menyatakan bahwa penerimaan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika Belanja Daerah meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah juga mengalami kenaikan. Rumusan hipotesis pertama sebagai berikut :

H1: Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Insukindro dalam Budiharjo (2003) peningkatan PDRB pada dasarnya merupakan hasil dari proses pembangunan ekonomi. Dengan meningkatnya PDRB diharapkan akan terjadi juga peningkatan

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Berbagai penelitian telah dilakukan oleh Muchtholifah (2010), Eni Aryanti dan In Indarti (2012), Purbayu Budi Santosa dan Retno Puji Rahayu (2005) dimana menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dirumuskan hipotesis kedua :

H2 : Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli daerah

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.

Diharapkan perekonomian dapat berkembang dengan dinamis dengan naiknya investasi, sehingga Pendapatan Asli daerah pada masing-masing Propinsi, Kabupaten/ Kota juga mengalami kenaikan. Walaupun Nurkholis Septiyan (2011) menyimpulkan bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun dalam penelitian ini tetap memiliki keyakinan lain sehingga hipotesis ketiga sebagai berikut:

Created with

H3: Investasi berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah dan yang menjadi objek dalam penelitian adalah Belanja Daerah, Produk Somestik Regional Bruto, Investasi dan Pendapatan Asli Daerah.

Data penelitian dikumpulkan melalui berbagai publikasi resmi yang dimuat dalam situs Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah, Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya data diestimasi dengan teknik *Fixed Effect Model (FEM)* dalam metode analisis regresi data panel dengan bantuan software Eviews 5.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Estimasi dengan Fixed Effect Model (FEM)

Tabel 1 Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Dependent Variable: PAD?

Method: Pooled Least Squares

Date: 09/11/14 Time: 15:54

Sample: 2008 2012

Included observations: 5

Cross-sections included: 35

Total pool (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.06E+08	21150712	-9.746557	0.0000
BD?	-0.001373	0.001772	-0.774767	0.4398
PDRB?	60.54963	5.794656	10.44922	0.0000
INVESTASI?	25.27390	5.910380	4.276189	0.0000

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.936426	Mean dependent var	94013744
Adjusted R-squared	0.919256	S.D. dependent var	77021276
S.E. of regression	21885910	Akaike info criterion	36.83006
Sum squared resid	6.56E+16	Schwarz criterion	37.51728
Log likelihood	-3184.631	F-statistic	54.53976
Durbin-Watson stat	1.424742	Prob(F-statistic)	0.000000

Koefisien Belanja Daerah sebesar -0,001373 dengan *probability* 0,4398 atau lebih besar dari alfa 0,05 sehingga Belanja Daerah tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Koefisien Produk Domestik Regional Bruto sebesar 60,5496 dengan *probability* 0,0000 atau

lebih kecil dari alfa 0,05 sehingga Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Koefisien Investasi sebesar 25,2739 dengan *probability* 0,0000 atau lebih kecil dari alfa 0,05 sehingga investasi berpengaruh

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari model FEM ini ternyata *adjusted R square* menghasilkan angka 0,9192. Hal ini berarti perubahan Pendapatan Asli Daerah disebabkan 91,92% karena perubahan Belanja Daerah, perubahan Produk Domestik Regional Bruto dan perubahan Investasi dan sisanya sebesar 8,08 % disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Bentuk persamaan regresi linier berganda secara umum adalah :

$$PAD = a + b1.BD + b2.PDRB + b3.I + e$$

Dari hasil Uji Chow dan Uji Hausman diperoleh bahwa model yang digunakan adalah FEM. Dari hasil model *Fixed Effect Model* maka bentuk persamaan regresi secara umum tanpa memandang Kabupaten / Kota yang menjadi obyek penelitian

$$PAD = -2,06 - 0,001373.BD + 60,5496.PDRB + 25,27390.I$$

Keterangan :

BD = Belanja Daerah

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

I = Investasi

Dari koefisien regresi data panel tersebut terlihat bahwa secara umum 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mengalami penurunan perolehan PAD sebesar 2,06 satuan rupiah. Namun apabila ditelisik per masing-masing Kabupaten/Kota, maka ditemukan bahwa koefisien paling tinggi ada pada Kabupaten Banjarnegara diikuti oleh Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Demak. Sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Temanggung, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten.

Penelitian ini sejalan dengan hasil Muchtholifah (2010), Eni Aryanti dan Iin Indarti (2012) yang menyimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kemudian hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan hasil Nurkholis Septiyan H.

(2011) yang menyimpulkan bahwa investasi tidak berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman maka peneliti memilih menggunakan *Fixed Effect Method* (FEM) untuk estimasi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini.
2. Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Investasi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Berdasarkan *adjusted R square* maka 90,16 % perubahan Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh perubahan Belanja Daerah, perubahan Produk Domestik Regional Bruto, dan perubahan Investasi. Sisanya 9,84 % disebabkan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian.
6. Penelitian ini sejalan dengan hasil Muchtholifah (2010), Eni Aryanti dan Iin Indarti (2012) tetapi tidak sejalan dengan hasil Nurkholis Septiyan H. (2011).

Saran

Beberapa saran yang diajukan rdasarkan hasil penelitian ini yakni:

1. Agar Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat, maka Pemerintah Kabupaten/Kota perlu meningkatkan usaha pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan yang sah secara intensif dan aktif.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan jumlah populasi dan sampel lebih diperluas pada tingkat Nasional sehingga hasilnya menjadi lebih baik dan dapat menambah variabel-variabel lain seperti Penerimaan Lain yang diduga dapat mempengaruhi Belanja Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abullah, Syukriy dan halim Abdul.2004. "Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda:Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan bali". *Jurnal Ekonomi STEI* No.2/tahun XIII/25.
- Adi,2005.Dalam David Harianto, Priyohadi Adi.*Hubungan Antara Dana Alokasi Umum,Belanja Modal,Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita*.2007.hal 2.Simposium Nasional Akuntansi.Juli.Makassar.
- Badan Pusat Statistik.2007. *Jawa Tengah Dalam Angka 2008*. BPS Propinsi Jawa Tengah:Semarang.
- Badan Pusat Statistik.2008. *Jawa Tengah Dalam Angka 2009*. BPS.Propinsi Jawa Tengah:Semarang.
- Badan Pusat Statistik.2009.*Jawa Tengah Dalam Angka 2010*.BPS.Propinsi Jawa Tengah:Semarang.
- Badan Pusat Ststistik.2012.*Jawa Tengah Dalam Angka 2011*.BPS.Propinsi Jawa Tengah:Semarang.
- Badan Pusat Ststistik.2013.*Jawa Tengah Dalam Angka 2012*.BPS.Propinsi Jawa Tengah:Semarang.
- Bastian, Indra.2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Jakarta:Salemba Empat
- Eni Aryanti, In Indarti, 2012, "Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang" **Jurnal STIE Widya Manggala**.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari.(2007), *Jurnal Ilmiah "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal"*, Makassar : **Simposium Nasional Akuntansi X**.
- Henny, Sherly Trirahmawati Friday, 2009, "Pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Studi Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah", **Tesis Magister Manajemen Unisbank Semarang**, Tidak Dipublikasikan.
- Hidayatulloh, Nurkholis Septyan, 2011, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Jombang", **Skripsi UPN Veteran Jatim**, Tidak Dipublikasikan.
- Hisamudin, 2002, "Variabel Yang Mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Kalimantan Barat", **Tesis Magister Ekonomi Pembangunan UGM Yogyakarta**, Tidak dipublikasikan.
- Indrakusuma, Arieanyi Widyarti, 2011, "Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Di Kota Semarang", **Skripsi Universitas Diponegoro Semarang**, Tidak Dipublikasikan.
- Kartika, Fitria Yuliani, 2013, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan *Fiscal Stress* Terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal Di Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2007 – 2011", **Tesis Magister Manajemen Unisbank Semarang**, Tidak Dipublikasikan.
- Mardiasmo.(2002).Perpajakan .Yogyakarta:Penerbit: Andi
- Muchtholifah, 2010, "Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya", **Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No. 2 Juli 2010**.

- Muchtholifah, 2010, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Mojokerto”, **Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No. 1 Januari 2010**.
- Nachrowi, Djalal Nachrowi, Hardius Usman. 2006. Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, **Lembaga Penerbit: Universitas Indonesia, Jakarta**
- Santosa, Purbayu Budi, Retno Puji Rahayu, 2005, “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri”, **Jurnal Dinamika Pembangunan Vol. 2 No. 1 Juli 2005**.
- Triani, Yeni Kuntari, 2012, “Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Periode 2003-2007 di Kabupaten Karanganyar”, **Jurnal STIE Widya Manggala Semarang**.
- Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 6 tentang Pendapatan Asli Daerah
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah
- Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing
- Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri
- Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang penanaman modal asing
- Undang-undang No. 12 Tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri.
- Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2002 tentang retribusi daerah pasal satu